

# MEREDUKSI DIKOTOMI MUHAMMADIYAH DAN AISYIAH UNTUK MENUJU PROFESIONALISASI

Dr. H. Ali Imron A.M.

## **Pendahuluan**

Di balik keberhasilan gerakan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang kehidupan, ternyata masih tersimpan mitos perempuan sebagai manusia kelas dua (*the second class, the second sex*) di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang masih banyak berpandangan bahwa perempuan merupakan sosok manusia kelas dua, tetapi juga di berbagai negara terutama negara berkembang. Hal ini tidak lepas dari pandangan sosio-kultural yang membedakan perempuan dengan laki-laki.

Sejarah mencatat, secara universal perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan itu tidak saja tampak dalam biologis yang terjelma dalam jenis kelamin, tetapi juga dalam hal lain yang lebih dikenal dengan gender. Perempuan sering dikatakan sebagai sosok makhluk yang lembut, indah, tidak asertif, tidak agresif, dan cenderung mengalah. Sedangkan laki-laki sering ditampilkan sebagai sosok manusia yang besar, kokoh, asertif, agresif, dan dominan.

Perbedaan laki-laki-perempuan itu membawa implikasi yang jauh dalam kehidupan sosial. Termasuk dalam bidang politik, demokrasi, dan kepemimpinan. Permasalahannya kini adalah bagaimana pola gerakan dan kepemimpinan perempuan Indonesia kontemporer, dan bagaimana agar gerakan perempuan mampu mengangkat eksistensinya secara mandiri?

## **2. Menelusuri Akar Subordinasi Perempuan**

Memang secara teoretis dan konseptual kini kaum perempuan dipandang sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Sayangnya dalam praktiknya, fakta menunjukkan bahwa perempuan di banyak komunitas berada di bawah dominasi laki-laki. Mau tidak mau, keadaan ini telah berarti segalanya bagi perempuan dalam sejarah dalam sejarah kebudayaan manusia. Sejarah manusia, baik yang sakral (yang diambil dari kitab-kitab suci atau mitos) maupun yang sekular (yang disusun

secara ilmiah) senantiasa menunjukkan sebagai sejarah laki-laki. Dari perspektif sejarah, jelas laki-laki dan perempuan tidak setara. Masyarakat di berbagai negara, mayoritas masih merupakan masyarakat patriarkal.

Dikotomi laki-laki-perempuan juga tercermin dalam pengkotakan "pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan" yang lebih dikenal dengan pembagian kerja secara seksual. Jelas perbedaan laki-laki-perempuan tidak saja ditentukan faktor biologis (tampak pada jenis kelamin) melainkan juga faktor sosial budaya (tercermin dalam gender).

Gender memang tidak bersifat universal, tetapi hierarki gender dapat dikatakan universal. Berbagai studi lintas budaya menunjukkan, bahwa perempuan selalu berada dalam posisi subordinatif. Karena subordinatif perempuan tidak dapat dijelaskan dengan perbedaan jenis kelamin, maka timbullah konsep gender. Dan, sampai saat ini belum ada satu pun teori yang dianggap mampu menerangkan akar subordinasi perempuan dengan memuaskan.

Teori yang dikembangkan untuk menjelaskan hierarki gender menurut Gailey (1987), ada empat kelompok yakni: (1) Teori adaptasi awal, yang berpandangan bahwa adaptasi awal manusia merupakan dasar pembagian kerja secara seksual, sekaligus menjadi dasar subordinasi perempuan di bawah laki-laki, (2) Teori teknik-lingkungan, yang menyatakan bahwa upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk sudah menjadi persoalan sejak zaman dulu. Subordinasi perempuan dalam konteks ini berakar pada peran reproduktifnya, (3) Teori sosiobiologi, yang menjelaskan bahwa dominasi laki-laki muncul sebagai akibat seleksi alam, dalam hal ini berkaitan dengan ketahanan tubuh, dan (4) Teori struktural, yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai status yang lebih rendah dibanding laki-laki, sekaligus otoritas yang lebih sedikit daripada laki-laki. Karena, perempuan berhubungan dengan arena domestik, sedangkan laki-laki lebih terlibat dalam arena publik.

Pembagian bidang kehidupan menjadi arena publik dan domestik ini dianggap universal. Dasar pembagian ini adalah tanggung jawab perempuan dalam proses kehamilan dan perawatan anak. Dengan demikian status relatif perempuan bergantung pada derajat keterlibatan mereka dalam arena publik dan partisipasi laki-laki dalam

arena publik. Teori struktural berargumentasi, bahwa subordinasi perempuan itu bersifat kultural, yang berakar pada pembagian kerja berdasarkan gender.

Di pihak lain, seperti kebudayaan lain, kebudayaan Indonesia --lebih-lebih Jawa-- menempatkan perempuan sebagai *the second sex* ataupun instrumen bagi laki-laki. Bahkan, konsep kebudayaan Jawa menempatkan perempuan sebagai *konco wingking* (teman di belakang, dapur). Artinya, perempuan dipandang sekedar teman hidup yang tugasnya di belakang, menangani urusan rumah tangga. Hal itu tercermin dalam ungkapan-ungkapan proverbial yang sangat mengagungkan laki-laki.

Padanan perempuan Jawa adalah *wanita*: artinya *wani ditata*, sehingga kebanyakan perempuan Jawa (tradisional) bersikap *nerima*, termasuk terhadap sikap dan perlakuan laki-laki terhadapnya. Juga lingkup gerakan perempuan bersifat domestik, dipandang berkisar sekitar dari dapur ke sumur, dari sumur ke kasur, dari kasur ke dapur, dan begitu seterusnya. Atau, perempuan itu tugas pokok dan fungsinya adalah *masak, macak, lan manak* yang berarti memasak, berhias diri, dan melahirkan. Ini berarti perempuan dianggap sekedar menjadi pelayan laki-laki dari memasak, menyajikannya di meja makan, mencuci pakaian, hingga menemaninya di tempat tidur (lihat Ali Imron A.M., 1995).

Lebih ekstrem lagi adalah ungkapan yang menyatakan perempuan itu *swarga nunut neraka katut* (atas laki-laki/suami), yang berarti kebahagiaan dan/atau penderitaan perempuan sangat bergantung pada laki-laki/suami. Itu semua mencerminkan bahwa kedudukan perempuan adalah subordinat laki-laki. Betapa perempuan dianggap tidak mempunyai peran penting dalam kehidupan. Perempuan sekedar "suplemen" bagi laki-laki, tidak memiliki kemandirian eksistensi nyata.

Perempuan mengalami *Cinderella Complex*, atau sindrom manusia kelas dua. Ironisnya perempuan seakan dibenarkan masyarakat jika dia cukup mengharap pertolongan laki-laki dalam menghadapi tantangan. Akibatnya, perempuan tidak akan dapat berperan banyak sebagai agen perubahan sosial yang mampu menentukan jalannya sejarah, bahkan menjadi manusia yang tertindas oleh sejarah. Manusia yang mampu "menyejarah" demikian memerlukan tantangan besar agar dapat berkarya besar. Dan, syarat terpenting untuk itu adalah adanya kebebasan dan kemandirian, meski bukan berarti hidup soliter.

*Cinderella Complex* yang menimpa perempuan kelas menengah ke atas akan menimbulkan kemandulan kreativitas. Sedangkan perempuan kelas bawah, tidak cukup keberanian untuk menentang diskriminasi yang dialaminya. Karena itu, tantangan utama perempuan sebelum ia menjadi agen perubahan sosial adalah kondisi psikologis dalam dirinya selain sistem patriarkis dalam masyarakat yang sangat tidak kondusif dalam mengangkat eksistensi dan kemandirian perempuan.

Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, maka ajaran Islam (Qur'an S. An-Nisa': 34): *Arrijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'* yang berarti "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan" yang ditafsirkan secara sempit, juga turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap eksistensi perempuan yang berada di bawah laki-laki. Hal ini mudah dipahami bilamana kita memahami kultur masyarakat Indonesia yang religius, yang menempatkan ajaran agama sebagai landasan hukum dan tradisi kehidupannya. Hukum dan tradisi yang terformulasikan dalam pola hidup berakar pada ajaran agama, seperti tercermin dalam ungkapan yang populer di masyarakat (Minang, misalnya): *Hukum basendi adat, adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*. Artinya, hukum berlandaskan adat, adat berlandaskan agama, dan agama berlandaskan al-Quran".

Padahal jika dicermati, mestinya kata *qawwaamuuna* itu bukan diartikan seperti lazimnya kebanyakan penafsiran orang selama ini, yakni laki-laki sebagai pemimpin atau pengatur perempuan. Kata *qawwaamu* merupakan term ekonomis, dan bukan biologis. Artinya, laki-laki diartikan sebagai pencari nafkah, bukan pengatur (lihat pandangan Riffaat Hassan dalam Wajidi, 1995). Lebih-lebih jika dicermati ayat berikutnya, *Arrijaalu qawwaamuunaa 'ala an-nisaa' bimaa fadh-dhalallaahu ba'dhahum 'alaa ba'dhin wabimaa anfaquu min amwaalihim*. Artinya, "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan pada yang satu dari yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya." Kalimat "Allah telah memberikan kelebihan pada satu dari yang lain, dan karena mereka memberi nafkah dari hartanya", kiranya jelas menunjukkan (dapat ditafsirkan) bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelebihan dan keduanya saling melengkapi. Jadi, dalam Islam laki-laki dan perempuan tidak bersifat hierarkis atau struktural melainkan bersifat fungsional.

Pemahaman ini akan lebih tegas lagi jika kita kaitkan dengan ayat al-Quran yang lain: *Hunnaa libaasul lakum waantum libaasul lahunnaa*. Artinya, "Mereka (perempuan) itu pakaian bagi kamu sekalian (laki-laki), dan kamu sekalian (laki-laki) merupakan pakaian bagi mereka (perempuan). Jelas, keduanya --laki-laki dan perempuan-- saling melengkapi dan setaraf, tidak subordinatif. Dapat pula ditambahkan betapa banyak ayat al-Quran yang menyatakan bahwa "*Apabila kamu sekalian beramal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan pahala dan surga bagi mereka.*" Juga ayat yang menyatakan, "*Yang paling baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik takwanya*". Ada juga ayat yang menyatakan bahwa "*Seorang laki-laki tidak akan menerima hasil suatu pekerjaan kecuali atas usahanya sendiri, demikian pula perempuan tidak akan menerima hasil suatu pekerjaan kecuali atas usahanya*". Ayat-ayat itu jelas menegaskan, bahwa siapa yang lebih bertakwa --baik laki-laki maupun perempuan-- maka itulah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Sekaligus ayat ini juga menyejajarkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama di mata Allah, hanya bobot ketakwaanlah yang membuat mereka berbeda. Tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan.

Hal lain yang membuat pandangan kultural bahwa perempuan itu sekadar pelengkap laki-laki adalah dongeng tentang Siti Hawa yang terjelma dari tulang rusuk Adam. Cerita ini jelas bukan bersumber dari Al-Quran (sebab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan demikian), melainkan dari kitab-kitab kuna agama Kristen dan juga Hadits-hadits --yang tentu saja masih perlu diteliti validitasnya (keshahihannya)--. Berdasarkan asumsi bahwa hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang memiliki otoritas sebagai sumber yang tak terbantahkan, maka jelaslah bahwa tidak satu sumber pun yang valid yang menyatakan adanya subordinasi perempuan dari laki-laki.

Dengan demikian, sebenarnya adanya pandangan atau mitos bahwa perempuan itu hanya suplemen atau subordinasi dari laki-laki selama ini merupakan "penyelewengan sejarah" tentang perempuan. Karena itu, jika tidak ada penyelewengan sejarah itu maka sebenarnya ada gerakan emansipasi perempuan. Tegasnya, yang diperlukan kini adalah "pelurusan sejarah tentang perempuan".

### **3. Resistensi Kebudayaan dari Kamar Pingitan**

Situasi kebudayaan dengan semangat subordinatif perempuan demikian sangat dominan hingga pertengahan abad XX. Kondisi itu harus berakhir dengan datangnya kebudayaan modern. Ketika para kawula muda Jawa terpelajar mendirikan Budi Utomo (BU), maka yang terjadi sesungguhnya adalah pemberontakan kebudayaan. Pemberontakan itu sangat penting artinya dalam sejarah Indonesia, karena ia menjadi tonggak bangkitnya nasionalisme (Indonesia) dan sekaligus mundurnya kebudayaan Jawa. Cara berpikir modern yang berbeda dengan yang diajarkan tradisi masyarakat saat itu, adalah landasan pemberontakan itu.

Fenomena yang menarik adalah bahwa sebelumnya telah terjadi pemberontakan kebudayaan serupa dengan skala lebih kecil, yang dilakukan seorang gadis yang berpikiran amat maju pada zamannya, justru dari dalam salah satu benteng kebudayaan Jawa saat itu: kamar *pingitan dalem* kabupaten Jepara. Pemberontakan gadis Kartini itu menjadi lebih bermakna karena ia mewakili kaum perempuan yang menjadi manusia kedua dalam kebudayaannya. Meski tidak ada hubungan langsung antara BU dengan Kartini, keduanya melihat kebudayaan dalam perspektif baru yang sama, yang lebih banyak mengandalkan dan menghargai rasionalitas dan kemampuan pribadi manusia.

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa posisi Kartini sebagai perintis pemberontakan kebudayaan dilakukannya secara committed. Boleh jadi ia kebetulan seorang perempuan yang memberontak terhadap dominasi laki-laki, namun tidak kebetulan bahwa itu semua karena ia berpikiran maju dan rasional. Karena itu, tidak kebetulan pula jika Kartini menjadi feminis pertama, dalam arti secara sadar dan argumentatif menentang "penjajahan" terhadap perempuan. Secara kongkret, apa yang dilakukan Kartini mungkin tidak banyak, namun tak pelak lagi ia menjadi simbol dalam politik perempuan dan demokratisasi di Indonesia.

### **4. Memadukan Muhammadiyah dan Aisyiah Menuju Profesionalisasi**

Tanpa bermaksud mengklaim bahwa kondisi sekarang berkat perjuangan Kartini, kedudukan perempuan di Indonesia kini kurang lebih sama dengan yang dicita-citakan Kartini. Perempuan Indonesia sekarang sudah merdeka secara politis dan retorik. Secara formal perempuan diakui sama dengan laki-laki, diberi

kesempatan yang sama, dan tidak ada penolakan terhadap sesuatu (jabatan misalnya) dengan alasan seseorang adalah perempuan. Merdeka secara politis, karena realitanya (pada tingkat sosiologis laki-laki tetap mendominasi kehidupan), jika dalam suatu persaingan perempuan kalah dengan laki-laki, hal itu karena kekalahan objektif, bukan dipolitisasi. Sri Mulyani, misalnya, toh bias menjadi Menteri Keuangan Indonesia. Demikian pula Megawati, toh bias menjadi Presiden Republik Indonesia, dan masih banyak lagi “perempuan perkasa” lainnya.

Sejalan dengan itu, maka yang terjadi dalam gerakan kepemimpinan perempuan, termasuk di Muhammadiyah, semestinya adalah profesionalisasi, bukan konsesi. Ketika sedikit banyak laki-laki tergeser dalam beberapa posisi, maka yang terjadi adalah pergantian pihak yang tidak mampu oleh yang mampu. Perubahan ini telah dapat diterima karena alasan rasional, yakni tidak terjadi atas dasar asumsi ideologis, tetapi atas dasar pertimbangan daya guna yang lebih besar. Dengan kata lain, atas dasar pertimbangan profesional, dan bukan konsesi politik.

Mengenai meleburnya tokoh-tokoh Aisyiah ke dalam PP Muhammadiyah sudah dibahas paling tidak sejak Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Aceh dan diintensifkan serta telah disepakati dalam Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Jakarta. Sayang sekali hingga kini keputusan itu belum direalisasikan secara konkret dan adil. Tetap saja Aisyiah –organisasi perempuan Muhammadiyah—berdiri di samping Muhammadiyah. Mengapa para tokoh Aisyiah tidak “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan seterusnya. Mengapa masih saja berdiri PP Aisyiah di samping PP Muhammadiyah?

Guna lebih meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dan gerakan perempuan pada umumnya, maka agaknya perlu dilakukan gerakan Kartini kotemporer. Gerakan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan diskriminasi terselubung terhadap perempuan Indonesia (hal ini sudah berlalu), tetapi lebih dari itu gerakan ini haruslah memberantas beberapa ideologi yang menjadi sumber dari persepsi yang mempersulit perempuan Indonesia untuk mengembangkan diri mereka

sebagai manusia mandiri, bukan suplemen kehidupan laki-laki. Karena, kemandirian adalah kunci utama menuju eksistensi perempuan setara dengan laki-laki.

Di samping itu, agaknya perlu pula dikembangkan budaya tandingan (*counter culture*) untuk melawan budaya militer dan budaya konsumtif yang sedang menjadi arus utama. Bentuk dari budaya tandingan tersebut, meminjam istilah Hafidz (1995) adalah otonomi dan karakteristik feminin. Otonomi berarti kemampuan untuk mengatakan "tidak" terhadap keinginan pihak lain yang bermaksud mendominasi atau memaksakan kekuasaannya. Karakteristik feminin diartikan sebagai sifat anti kekerasan, memelihara, menumbuhkan, menyayangi, intuitif, kreatif, dsb. sebagai lawan dari karakteristik maskulin (rasional, keras, merusak, menaklukkan, persaingan, mengejar keuntungan, dsb.) yang saat ini dominan.

### **5. Retrukturisasi Organisasi: Mereduksi Dikotomi Perempuan-Laki-laki**

Dalam hal gerakan dan kepemimpinan perempuan di Indonesia, tampaknya gerakan mereka masih diwarnai sikap ideologis dan dihadapi oleh pihak luar yakni laki-laki, dengan sikap sama. Dalam konteks itulah, agaknya kemajuan kaum perempuan di Indonesia masih cenderung bersifat konsensional atau ideologis. Perempuan masih banyak diberi karena pertimbangan politis dan ideologi, bukan karena kemampuan mereka. Konsesi pada akhirnya akan mengecewakan, karena tidak mengubah posisi ketergantungan perempuan pada laki-laki.

Contoh menarik kedudukan konsensional yang diberikan atas dasar pemikiran ideologis adalah apa yang terjadi pada organisasi IMMAWATI-anggota IMM perempuan dan KOHATI-anggota HMI perempuan. Begitu pun AISYIAH yang mendampingi Muhammadiyah. Hal ini mencerminkan adanya "kompleks identitas". Artinya, setelah perempuan relatif bebas bergerak, gerakan perempuan cenderung menunjukkan identitas dirinya sebagai organisasi perempuan, sekadar untuk membedakan diri dari laki-laki. Di satu pihak perempuan dihargai dengan diberi wadah tersendiri, namun di lain pihak mereka sebenarnya mengurung diri sehingga tidak akan pernah sama dengan anggota laki-laki.

Pembedaan demikian memang memberi kesempatan kepuasan psikologis, karena dengan begitu perempuan dapat menunjukkan arti penting eksistensinya. Namun hal ini sekaligus mengundang bahaya yakni perempuan terperangkap dalam

kemasan formalitas atau retorika politik. Perempuan dipandang setara dengan laki-laki hanya karena telah memiliki organisasi, padahal sesungguhnya organisasi perempuan yang eksklusif justru menunjukkan ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki. Jika kemerdekaan perempuan berhenti pada tingkat formalitas politik, maka yang terjadi adalah manipulasi, atau kemerdekaan tanpa substansi. Tegasnya, penonjolan identitas ini justru merupakan pengakuan inferioritas perempuan di hadapan laki-laki, karena dalam praktik sehari-hari (secara sosiologis, bukan politis) perempuan masih dianggap kelas dua. Dalam keadaan demikian, perempuan meminta keistimewaan dan mendapat perlindungan dari laki-laki. Pengusaha atau sarjana perempuan tidak pernah menonjolkan prestasi mereka lebih besar daripada kenyataan bahwa mereka adalah perempuan.

Jika kondisi itu dipertahankan maka sangat sulit untuk menciptakan tokoh pemimpin perempuan (Aisyiah) yang mampu berkompetisi dengan pemimpin laki-laki (Muhammadiyah). Artinya, anggota perempuan dihargai karena keperempuannya, bukan kompetensinya. Hal itu jelas merupakan pembagian yang *sexist*, yang memang sangat mendasar tetapi sekaligus naif karena hanya memperhatikan jenis kelamin manusia. Untuk itu, organisasi besar semacam Muhammadiyah, HMI, dan IMM yang tentunya berorientasi pada intelektual dan profesional, kiranya pembagian seksis itu perlu dikaji ulang, karena sudah tidak relevan lagi dengan eksistensi kaum kontemporer sekarang.

Tegasnya, sudah saatnya para tokoh “perempuan perkasa” Aisyiah selayaknya mampu berkompetisi dengan para tokoh Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah. Sehingga, PP Muhammadiyah pasca-Muktamar ke-43 tahun 2010/Satu Abad Muhammadiyah kelak diisi oleh para putra dan putri Muhammadiyah yang benar-benar memiliki kapabilitas, akseptabilitas, dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya tanpa memandang laki-laki- atau perempuan. Siapa pun baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kompetensi dapat menduduki PP Muhammadiyah, tidak terjadi lagi dikotomi PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah yang bersifat konsesif. Itulah yang dimaksud gerakan perempuan Muhammadiyah bergerak dari konsesi menuju ke profesionalisasi. Tampaknya untuk menuju terwujudnya hal itu diperlukan keberanian semua pihak untuk melakukan inovasi tanpa harus berhenti pada romantisme lama.

Kemerdekaan politis itu belum menyelesaikan segala persoalan hubungan laki-laki-perempuan. Meminjam retorika populer, maka tugas utama perempuan Indonesia sekarang adalah mengisi kemerdekaan politik yang telah dicapai, dengan meningkatkan politik yang telah dicapai itu dapat benar-benar menjadi realitas, bukan kualitas intelektual dan kemampuan, bukan lagi emansipasi. Sebab, sekali lagi emansipasi itu sudah tidak relevan lagi. Jadi, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kaum perempuan mengejar ketertinggalannya dari laki-laki dari berbagai aspek agar kemerdekaan sekedar mitos.

Sesungguhnya kini telah berlaku suatu kompromi antara laki-laki-perempuan. Kompromi itu menampung kepentingan mereka bersama --dan ini sulit untuk dibantah-- yang dalam bahasa kebudayaan yakni untuk mencapai kebahagiaan. Untuk itulah perempuan harus membuat kesepakatan dan transaksi dengan laki-laki. Transaksi ini harus terjadi, karena feminisme radikal yang menjauhkan perempuan dari laki-laki tidak (atau belum) dapat diterima di Indonesia. Karena itu, perempuan harus maju bersama dengan laki-laki yang --mau tak mau-- dominan. Perempuan sebagai pendamping laki-laki inilah yang kemudian oleh pemerintah dijadikan "Ideologi nasional resmi" untuk menangani politik perempuan. Munculnya Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan mudah dipahami dari kacamata ini.

## **6. Kepemimpinan Perempuan ke Depan**

Berbeda dengan masa-masa lalu ketika organisasi perempuan tumbuh subur sebagai mitra organisasi kaum laki-laki, gerakan kaum perempuan ke depan akan lebih dinamis karena berkompetisi dengan kaum laki-laki dalam satu organisasi. Hal itu dapat dipahami mengingat pada masa depan kaum perempuan semakin mandiri dengan eksistensinya yang makin kokoh.

Pada masa Orde Baru kepemimpinan perempuan dengan segala organisasi dan gerakannya, justru dianggap kehilangan peran dan signifikansinya dalam pergulatan menentukan arah transformasi sosial budaya yang tengah berlangsung dalam masyarakat kita. Selain kondisi politik masa Orde Baru yang cenderung menghindari daya kritis dan inovatif mereka, secara internal kepemimpinan perempuan juga mengalami masalah. Pada organisasi-organisasi tua dan aktivisnya,

perasaan telah menyelesaikan tugas akhirnya menjadikan mereka merasa sudah waktunya pensiun. Jika organisasinya tidak bubar dan masih melakukan berbagai aktivitas, pada intinya perhatian mereka banyak terfokus pada romantisme masa lalu dengan mengelus dan mengagumi keberhasilan perjuangannya. Mereka sibuk membongkar pasang pasal-pasal hak keperempuanan dalam perkawinan, kegiatan khas keperempuanan, seolah-olah zaman tidak bergerak dan permasalahan yang dihadapi kepemimpinan perempuan masih sama dengan abad XIX atau sebelumnya.

Masyarakat kita sekarang sedang mengalami suatu proses perubahan yang sangat cepat menuju masyarakat industri. Proses itu telah memunculkan modal besar sebagai kekuatan baru, di samping birokrasi dan militer. Ketiga kekuatan dominan itulah, yang dengan uang, kekuasaan, dan kekuatan, saat ini menentukan hampir segala aspek kehidupan dalam masyarakat.

Kecenderungan utama masyarakat industri adalah komoditasi, termasuk komoditasi manusia. Dengan bantuan teknologi yang maju pesat, kekuatan-kekuatan dominan telah menjadi mayoritas masyarakat sebagai komoditi yang lemah posisinya dan konsumen yang pasif. Mayoritas perempuan, karena kondisi dan kapasitasnya yang cenderung lebih tertinggal dibanding laki-laki dalam banyak faktor penting, telah menjadi pihak yang paling rentan sebagai komoditi. Masalah TKW, buruh perempuan di sektor industri, dan para pekerja seks di industri pariwisata, adalah wajah bopeng dari permasalahan perempuan dewasa ini. Dalam peran sebagai konsumen, perempuan juga menduduki posisi penting sebagai objek utama. Iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik adalah contoh yang tidak berlebihan dalam konteks ini.

Banyak perempuan yang dengan demikian mudah menyediakan diri menjadi objek bagi masyarakat laki-laki dan “menjual diri” dengan memamerkan kecantikan, aurat, dan kemolekan tubuhnya yang indah kepada publik dalam iklan atau promosi industri. Hal itu dilakukan semata-mata demi memperoleh segepok uang tanpa mempedulikan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang semestinya menjunjung tinggi kemanusiaan, harga diri, dan eksistensinya. Sebuah perilaku yang ironis bahkan kontraproduktif dipandang dari perspektif gender yang ingin memperjuangkan kesetaraan laki-laki dengan perempuan sebagai subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek.

## 7. Purna Wacana

Mengakhiri pembicaraan ini, perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya fenomena gerak perempuan Indonesia, termasuk perempuan Muhammadiyah, kini mengalami pergeseran. Gerakan perempuan kontemporer menunjukkan perubahan yakni dari konsesi (dulu) ke profesionalisasi (kini). Hanya permasalahannya, seberapa jauh perempuan mampu memanfaatkan peluang itu dengan memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan laki-laki. Jika ternyata tokoh-tokoh perempuan kalah bersaing sehingga posisi kepemimpinan PP Muhammadiyah diduduki mayoritas laki-laki, maka bukan berarti kepemimpinan perempuan belum diakui, melainkan tak lebih dari kemampuannya yang masih kalah dengan laki-laki.

Kemandirian perempuan, baik dalam sikap maupun dalam memenuhi kebutuhan sendiri, merupakan modal paling penting dalam mewujudkan gerakan dan kepemimpinan perempuan Indonesia yang prospektif. Untuk itu, mau tak mau perempuan harus mampu berkompetisi dengan laki-laki dengan meningkatkan kualitas diri baik dalam intelektual, organisasi, kepemimpinan maupun kemampuan lain, jika tak ingin perempuan dianggap kelas dua. Karena, pada gilirannya, --dan kini sudah tampak-- kepemimpinan perempuan tidak lagi konsensional atau bersifat politis melainkan profesional. Kaum perempuan sudah saatnya berkompetisi dengan kaum laki-laki dalam suatu organisasi sehingga tidak lagi dikotomik.

Untuk itu, agaknya sudah saatnya dilakukan rekonseptualisasi dan restrukturisasi pada organisasi-organisasi semacam Muhammadiyah, HMI, IMM, dan sebagainya yang masih --langsung atau tidak langsung-- membuat dikotomi laki-laki-perempuan. Akan lebih baik jika tidak ada Aisyiah, KOHATI, atau IMMAWATI, yang ada adalah Muhammadiyah, HMI, dan IMM dengan kepemimpinan yang diduduki oleh para tokoh profesional baik laki-laki maupun perempuan. Sebab dengan demikian tokoh pemimpin perempuan akan berkompetisi dengan laki-laki dalam satu organisasi dan akan dapat membuktikan dirinya mampu menjadi mitra laki-laki, bukan lagi sekadar suplemen laki-laki. Atau, perempuan bukan sekadar sebagai pelengkap penderita? Bagaimana para Kartini dan Aisyiah muda, siapkah untuk berkompetisi dengan laki-laki dalam Muktamar

Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 ini? Jawabannya tentu terpulang pada eksistensi kaum perempuan itu sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- A.M., Ali Imron. 1995. "Signifikansi Ilmu-ilmu Humaniora dalam Pembangunan Bangsa: Perspektif 50 Tahun Indonesia Merdeka". *Orasi Ilmiah* pada Upacara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanggal 12 Agustus 1995.
- Gailey, Christine Ward. 1987. "Evolutionary Perspectives on Gender Jierarchy" dalam Beth B. Hess dan Myra Marx Ferree, Eds. *Analyzing Gender, a Handbook of Social Science Research*. Sage Publications, Inc.
- Hafidz, Wardah. 1995. "Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia" dalam Fauzi Ridjal dkk. (Ed.). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* Yogyakarta: Yayasan Hatta.
- Jassin, H.B. 1978. *Al-Quranul Karim Bacaan Mulia*. Jakarta: Djambatan.

ooOoo